

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disahkan pemerintah terhitung mulai tanggal 22 juni 2009 merupakan awal perubahan sistem dalam pengaturan lalu lintas dan penerapan sanksi atas pelanggaran lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah berjalan tahap sosialisasinya kepada warga masyarakat Indonesia yang sebagai subyek hukum dari undang-undang tersebut. Bukan merupakan hal mudah dalam mensosialisasikan produk hukum baru seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lama apalagi pelaksanaan Undang-undang ini telah berjalan 2 tahun lebih. Dalam hal ini banyak perbedaan diantara isi dari undang-undang yang lama dengan yang baru dan dengan adanya tahapan sosialisasi ini diharapkan isi undang-undang yang baru ini dapat diterima oleh masyarakat dan mampu merubah kebiasaan-kebiasaan di masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas di jalan raya.

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digagas oleh Departemen Perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan Undang-undang lainnya. Yang lebih penting dari hal tersebut adalah bagaimana kita dapat menjawab dan menjalankan amanah yang tertuang didalamnya. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 dinyatakan :”bahwa tugas pokok dan

fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas”.

Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti UU No. 14 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan yang masih tetap berlaku meskipun PP No. 41 Tahun 1993 merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 14 tahun 2003 dikarenakan disebutkan dalam Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 bahwa : “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini ”.

Pada penelitian ini mengkhususkan membahas mengenai jasa pengawasan Kepolisian yang mengacu pada pasal 134 huruf g Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas. Di dalam Pasal 134 UU tentang lalu lintas , disebutkan

pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas
- b. Ambulans yang mengangkut orang sakit
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
- d. Kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara
- f. Iring-iringan pengantar jenazah
- g. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dilihat dari pasal tersebut terlihat ada sejumlah kondisi yang membuat pengguna jalan mendapat hak utama. Namun, perlu dijelaskan lebih lanjut soal hak utama bagi konvoi yang tercantum pada Pasal 134 UU tentang lalu lintas huruf g. Dari hal tersebut pasal undang-undang ini diikuti dengan peraturan pemerintah dalam Pasal 34 ayat 1 PP Nomor 43 Tahun 1993 bahwa dalam keadaan tertentu petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan:

- a. memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pemakai jalan tertentu
- b. memerintahkan pemakai jalan untuk jalan terus
- c. mempercepat arus lalu lintas
- d. memperlambat arus lalu lintas
- e. mengubah arah arus lalu lintas

“Keadaan tertentu” yang dimaksud dalam ayat tersebut bisa dalam berbagai bentuk, termasuk di antaranya “keadaan tertentu yang diakibatkan pengawalan”. Kriteria yang memaksa terjadinya “Keadaan Tertentu” diatur dalam Pasal 18 UU Kepolisian dikatakan, untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. “Bertindak menurut penilaiannya sendiri” itu biasa disebut dengan istilah wewenang Diskresi Kepolisian. Satu-satunya instansi yang memiliki kewenangan diskresi berdasarkan Undang-undang hanyalah Polri. Tidak ada satu lembaga pun di negara ini yang mempunyai kewenangan demikian. Dalam Pasal 34 Ayat 2 PP Nomor 43 Tahun 1993 juga ditekankan, pemakai jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas polisi. Pada ayat 2 dipertegas lagi, perintah yang diberikan oleh petugas polisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib didahulukan daripada perintah yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas. Artinya, jika petugas kepolisian memerintahkan pengguna jalan untuk berhenti, dia harus berhenti walaupun alat pemberi isyarat lalu lintas atau rambu-rambu memerintahkan untuk berjalan.

Kasus yang baru ini terjadi adalah aksi konvoi motor gede (moge) di Sleman, Yogyakarta, yang menerabas lampu lalu lintas dan mendapat pengawalan kepolisian. Kejadian ini sempat menjadi trending topic dan bahasan luas di kalangan Netizen. Kronologis kejadiannya adalah tiga warga melakukan aksi menghadang konvoi motor Harley-Davidson di perempatan Condong Catur Depok, Sleman. Aksi ini dilakukan karena mereka merasa resah akan ulah

beberapa pengendara motor gede (moge) yang melanggar peraturan dan diistimewakan saat melintasi jalanan di Yogyakarta. Pada tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 15.00 WIB, Erlanto Wijoyono yang sedang bersepeda bersama temannya yang bernama Andika tiba di Perempatan Condongcatur Sleman. Setelah itu, ketika rombongan Harley-Davidson melintas, Wijoyono melangkah ke tengah jalan raya menghadang dengan sepedanya bersama Andika. Satu warga yang melintas dan melihat aksi itu pun langsung turun dari motor dan langsung bergabung bersama Wijoyono serta Andika untuk menghadang rombongan Harley. Wijoyono pun sempat berdebat dengan salah satu pengendara Harley. Dalam perdebatan itu, Wijoyono dan Andika meminta pengendara Harley mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak menghidupkan sirine. Menurut warga ini aksi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara Harley terkesan hal yang biasa dan dibiarkan saja padahal aksi melanggar lalu lintas itu membahayakan pengendara lain. Selain itu, pengguna jalan lainnya terkesan di-nomor duakan. Padahal lanjutnya warga juga memiliki hak yang sama dalam menggunakan jalan raya. Maksud dari warga itu bukan menolak adanya kegiatan Harley-Davidson di Yogyakarta tetapi berharap pengendara Harley bisa menaati aturan lalu lintas dan menghormati pengendara lainnya. (Aksi Pria Bersepeda Hadang Konvoi Harley-Davidson di Sleman, Kompas.com, diakses tanggal 2 Januari 2015)

Dari kasus di atas maka perlu ada kajian mengenai peraturan lalu lintas terutama pasal yang ada dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas. Pengawasan kepolisian terhadap rombongan moge ini tidak beda dengan pengawasan Polisi kepada mobil jenazah, rombongan pengantin dan iring-iringan lainnya. Ketika ada pengajuan permohonan pengawasan dari masyarakat, pihak

kepolisian akan melihat, mempertimbangkan dan menentukan seperti apa pola pengawalan yang akan dilakukan dari adanya permohonan tersebut. Pengawalan ini sebenarnya bukan hanya bertujuan untuk mengamankan si pemohon pengawalan, namun juga pengendara lain di jalan raya dari adanya kegiatan tersebut.

Pada umumnya sebagian besar masyarakat tidak mengetahui pasal-pasal yang ada di Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas. Yang masyarakat paham adalah mengenai rambu-rambu lalu lintas di jalan. Sedangkan masyarakat di kota Malang memiliki kebutuhan mobilitas yang tinggi karena sebagian besar masyarakat kota Malang tingkat ekonomi dan pendidikan tergolong tinggi atau sebagian besar memiliki kendaraan pribadi.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam mengenai aturan dan dasar hukum bagi masyarakat pengguna lalu lintas pada umumnya dan masyarakat yang menggunakan jasa pengawalan pribadi pada khususnya, sehingga ketertiban lalu lintas dapat diwujudkan. Selanjutnya penulis menyusunnya dalam suatu penulisan hukum yang berjudul: "IMPLIKASI PASAL 134 HURUF G UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS TERHADAP JASA PENGAWALAN MOBIL PRIBADI OLEH PIHAK KEPOLISIAN DI KOTA MALANG"

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implikasi pasal 134 huruf g UU No. 22 Tahun 2009 mengenai “Kepentingan Tertentu” yang diperbolehkan dalam menggunakan pelayanan Pengawalan?
2. Hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan oleh pihak kepolisian kota Malang untuk melakukan pengawalan?

## **C. Tujuan penelitian**

Masalah yang ada adalah untuk mencapai tujuan yang diantaranya meliputi:

1. Untuk mengetahui implikasi pasal 134 huruf g Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas terhadap jasa pengawalan mobil pribadi oleh pihak kepolisian di kota Malang.
2. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi bahan pertimbangan oleh pihak kepolisian di kota Malang dalam melakukan pengawalan

## **D. Manfaat Penelitian**

Dapat kita ketahui bahwa nilai suatu penelitian suatu penelitian tergantung pada metodologinya, juga tentunya dalam hal ini ditentukan pula besarnya manfaat penelitian tersebut. Untuk itu dalam penulisan Skripsi ini penulis mengharapkan adanya manfaat yang bisa diperoleh, antara lain:

1. Secara teoritis, untuk menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana dasar hukum masyarakat khususnya mobil pribadi apabila membutuhkan pengawalan dari Kepolisian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dan juga referensi yang memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan Polres kota Malang dalam

mengimplementasikan pasal 134 huruf g Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.

2. Secara praktis, memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan dapat memberikan sumbangan pemikiran juridis dan masukan-masukan yang bermanfaat demi perkembangan ilmu hukum khususnya implementasi pasal 134 huruf g Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas.
3. Manfaat bagi peneliti. Hasil penelitian ini digunakan oleh peneliti sebagai penambahan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dasar hukum masyarakat yang membutuhkan pengawalan dari Kepolisian dan implementasi pasal 134 huruf g Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas serta syarat untuk penulisan tugas akhir dan menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Pendekatan masalah**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan yang di tempuh melalui penelitian yang sistematis dan terkontrol berdasarkan suatu kerangka pembuktian untuk mendapatkan data secara langsung terhadap obyek yang di teliti dengan mengadakan penelitian langsung ke tempat penelitian. Dalam hal ini penulis meneliti implikasi pasal 134 huruf g Undang – Undang No 22 tahun 2009 tentang kepentingan tertentu yang di perbolehkan dalam menggunakan pelayanan pengawalan menurut pertimbangan dari pihak kepolisian terhadap jasa pengawalan.



## **2. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polresta Kota Malang. Alasan peneliti dan mengambil lokasi ini adalah banyaknya masyarakat yang meminta jasa pengawalan di satlantas polres kota malang dalam kegiatannya.

## **3. Sumber Data**

### **a. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau sumber data yang di peroleh dari sumber informasi yang pertama dengan narasumber yaitu Safari SH KAUR MINTU untuk mengali data yang berkaitan dengan pasal 134 huruf g undang –undang no 22 tahun 2009 tentang kepentingan tertentu yang di perbolehkan dalam menggunakan pelayanan pengawalan menurut pertimbangan dari pihak kepolisian terhadap jasa pengawalan mobil pribadi di kota malang.

### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari dari undang -undang, literature, laporan-laporan, buku, majalah serta revensi yang berkaitan pasal 134 huruf g no 22 tahun 2009 tentang kepentingan tertentu yang di perbolehkan menggunakan jasa pengawalan atas pertimbangan dari pihak kepolisian.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Studi kepustakaan**

Yaitu data yang diperoleh dari membaca, mempelajari literatur buku-buku yang membahas mengenai permasalahan yang penulis angkat.

#### **b. Wawancara**

Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak kepolisian kota malang. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data informasi atau keterangan terkait jasa pengawalan mobil pribadi oleh pihak kepolisian kota Malang

Adapun subyek penelitian yang berasal dari Satlantas Polres Kota Malang adalah:

- 1) Kasat Lantas Polres Kota Malang AKP Bambang Cristanto
- 2) Wawancara dengan KAUR MINTU Polres Kota Malang Safari S.H

Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah pelaksanaan dan prosedur dasar pengawalan kepolisian terhadap masyarakat di Kota Malang khususnya mobil pribadi dan konvoi.

#### **c. Studi Dokumentasi**

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran terhadap bahan-bahan kepustakaan yaitu buku-buku yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, mencatat, menyalin data-data yang berkaitan dengan pasal 134 huruf g no 22 tahun 2009 tentang kepentingan tertentu yang di perbolehkan menggunakan jasa pengawalan atas pertimbangan dari pihak kepolisian.

### **5. Analisis Data**

Teknik yang dipakai oleh penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah menggunakan analisa kualitatif, artinya uraian yang penulis lakukan terhadap data hasil penelitian tidak menggunakan angka-

angka dan tidak dilakukan pengukuran sehingga data yang diperoleh adalah data yang bersifat kualitatif.

#### **d. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **BAB I :Pendahuluan**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penulisan, dan sistematika penulisan yang akan digunakan dalam usulan penelitian ini.

#### **BAB II :Tinjauan Pustaka**

Merupakan bab dimana dalam bagian ini penelitian menyajikan teori teori maupun kaidah kaidah yang bersumber dari peraturan perundang – undangan maupun literature – literature yang akan digunakan untuk mendukung analisis yang akan dilakukan pada penelitian yaitu mengenai pasal 134 huruf G Undang- Undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas terhadap jasa pengawalan mobil pribadi oleh pihak kepolisian di kota malang.

#### **BAB III :Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Pada bab ini pembahasan yang berisikan penjelasan dan memaparkan data – data hasil penelitian yang didapat dari tehnik pengumpulan data dengan tujuan untuk mendukung analisis penulis terkait dengan analisis pasal 134 huruf G undang-undang no.22 tahun

2009 tentang lalu lintas terhadap jasa pengawalan mobil pribadi oleh pihak kepolisian di Kota Malang.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab akhir dalam penelitian, dimana berisikan kesimpulan dari pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya serta berisikan saran penulis dalam menanggapi permasalahan yang telah diangkat dan diteliti oleh penulis mengenai analisis pasal 134 huruf G undang-undang no.22 tahun 2009 tentang lalu lintas terhadap jasa pengawalan mobil pribadi oleh pihak kepolisian di kota malang.

